



ARTIKEL

Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara

Socio-Cultural Transformation People of IKN Nusantara

Hari Prasetyo Sutanto  

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri

 prastyoharie@gmail.com

Citation: Sutanto, H. P. (2022). Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.43-56>

Naskah Diterima: 26 Oktober 2022

Naskah Disetujui: 31 Oktober 2022

Naskah Diterbitkan: 30 November 2022

© Penulis



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Kata Kunci: Transformasi Sosial Budaya, Penduduk, Ibu Kota

Abstrak: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur sah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), yang kemudian dikenal dengan IKN Nusantara. Membangun IKN tidak hanya menyiapkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan pendukungnya, tetapi juga membangun kesiapan penduduknya, baik penduduk tempatan maupun penduduk pendatang. Perbedaan karakteristik keduanya akan berdampak pada perubahan sosial budaya yang dikenal dengan istilah Transformasi Sosial Budaya. Kajian ini ingin mengetahui bagaimana tantangan dalam transformasi sosial budaya dan kebijakan apa yang sesuai terhadap proses transformasi sosial budaya penduduk lokal dan penduduk pendatang? Kajian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil kajian menyimpulkan transformasi sosial budaya dihadapkan pada tantangan saat ini (literasi digital, kesiapan pemda, dan potensi hilangnya hunian penduduk adat) dan tantangan akan datang (urbanisasi yang masif, munculnya budaya baru, dan konflik akibat kesenjangan sosial) yang perlu diantisipasi melalui kebijakan strategis yang memerlukan kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah, Pemda, swasta, LSM dan masyarakat.

Abstract: The translocation of the State Capital (IKN) to East Kalimantan has been legalized through the issuance of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital, which was later known as IKN Nusantara. Building the capital city of the country also means building the readiness of the population, both local residents and immigrants. Differences in the social and cultural characteristics of immigrants and local residents will have an impact on major socio-cultural changes that are comprehensive for the better and more advanced, known as Socio-Cultural Transformation. On this basis, what are the challenges in socio-cultural transformation and what policies are appropriate for the socio-cultural transformation process of local residents and immigrants? This study uses a literature study method. The result of this study is that socio-cultural transformation is faced with current challenges (digital literacy, local government readiness, and the potential loss of indigenous people's homes) and future challenges (massive urbanization, the emergence of new cultures, and conflicts due to social inequality) that need to be anticipated through strategic policies that require collaboration and coordination between the Government, Local Government, private sector, NGOs and the community.

Keywords: Socio-Culture Transformation, Population, Capital City

1. Pendahuluan

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur secara resmi disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2019. Kemudian, melalui rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Januari 2021, Rancangan Undang-Undang IKN disahkannya menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hadirnya IKN baru akan mengubah orientasi pembangunan yang sebelumnya dikenal Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris untuk mempercepat pemetaan pembangunan Indonesia.

Undang-undang IKN menerangkan bahwa Ibu Kota yang diberi nama Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah khusus setara Provinsi berbentuk **Otorita**. Otorita IKN Nusantara akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara yang berkedudukan setara Menteri dan dibantu oleh seorang Wakil yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Otorita IKN Nusantara akan dibagi atas beberapa wilayah yang bentuk, jumlah dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan yang akan diatur melalui Peraturan Presiden.

Menurut Undang-Undang IKN, cakupan wilayah IKN Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha. Wilayah IKN Luas wilayah darat IKN terdiri dari 56.180 ha kawasan IKN Nusantara dan 199.962 ha kawasan pengembangan. Secara administratif, IKN Nusantara terletak di dua kabupaten, yaitu sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa dan Samboja.

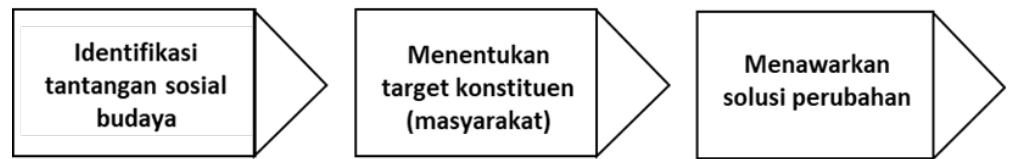
Membangun Ibu Kota Negara (IKN) tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya ([Kominfo, 2020](#)). Kementerian PPN/Bappenas telah memproyeksikan jumlah penduduk IKN Nusantara akan bertambah dari 100.000 jiwa di tahun 2020 menjadi 700 ribu jiwa di 2025, kemudian berkembang menjadi 1,5-1,6 juta jiwa di 2035, hingga mencapai dan urbanisasi yang akan terjadi di Ibu Kota Negara 1,7-1,9 juta jiwa di 2045. Untuk menyikapi ini, pemerintah perlu membangun desain rancangan kotanya, sarana prasarana, bentuk pemerintahan dan tatakelola, dukungan SDM/aparaturnya, analisis dampak lingkungan ekologi, ekonomi, sosial budaya, aspek demografi, kearifan lokal, hingga transportasi ([Kominfo, 2020](#)).

Perwujudan Ibu Kota Negara yang maju, harmonis dan sesuai dengan identitas bangsa Indonesia memerlukan pemahaman dan perencanaan aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang komprehensif. Perencanaan aspek sosial dilaksanakan dengan memastikan: penerimaan penduduk, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal, sumber-sumber penghidupan penduduk, serta peran berbagai pihak termasuk generasi milenial dalam pembangunan IKN ([Kominfo, 2020](#)). Ibu Kota Negara perlu dibangun dengan masterplan pembangunan yang menerapkan prinsip inklusif, lestari, berkelanjutan serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mendorong pemerataan ke seluruh wilayah Indonesia.

Perbedaan karakteristik sosial budaya antara penduduk setempat dan pendatang perlu diantisipasi sejak awal agar ketahanan penduduk secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya dapat terwujud ([Bappenas, 2019](#)). Kebudayaan penduduk setempat yang sudah mempengaruhi hidup secara turun temurun perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai bagian dari pembangunan IKN Nusantara. Penduduk setempat dan penduduk pendatang akan menyatu dan melakukan perubahan secara sosial dan budaya secara bersama-sama. Perubahan besar dan menyeluruh wujud dan karakteristik penduduk dari suatu keadaan ke keadaan lain untuk menjadi lebih baik atau lebih maju dikenal dengan istilah **Transformasi Sosial Budaya** ([Kistanto, 2018](#)).

Transformasi sosial budaya dilakukan melalui tiga langkah, yaitu mengidentifikasi tantangan sosial budaya, pemilihan target konstituen (kelompok penduduk) dan menawarkan solusi transformasi ([Charles, 2014](#)). Pertama, mengidentifikasi tantangan sosial-budaya pada saat sekarang dan tantangan di masa yang akan datang yang meliputi kondisi pendidikan, kesehatan atau ketidakadilan. Kedua, melihat sasaran-sasaran yang akan menerima dampak secara strata sosial, baik saat ini dan masa yang

akan datang. Ketiga, menyediakan solusi perubahan perilaku yang bertujuan pada perubahan yang lebih kreatif, kolaboratif dan berbudaya.

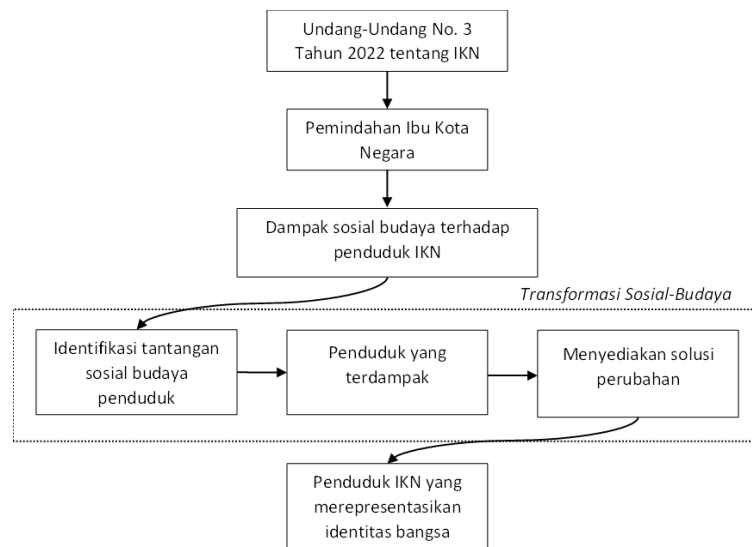


Gambar 1. Tiga Tahapan Transformasi Sosial Budaya

Sumber: Charles, 2014

Pemindahan Ibu Kota Negara membawa pengaruh sosial budaya, yaitu: perubahan sosial budaya yang terjadi sangat cepat, potensi konflik pendatang dan penduduk setempat, perpindahan penduduk ke daerah sekitar yang menuntut penanganan sosial tertentu, serta harus membentuk budaya baru dengan konsep dan tata ruang dan manajemen perkotaan modern (Prasojo, 2020). Sehingga, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur perlu dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah yang tidak kita inginkan. Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya penduduk akan membantu Indonesia mewujudkan IKN yang “*Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable*” (Prasojo, 2020).

Hadirnya Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan berdampak pada terjadinya transformasi sosial budaya penduduk pendatang dan penduduk setempat. Berdasarkan latarbelakang tersebut, bagaimana tantangan dalam transformasi sosial-budaya penduduk di IKN Nusantara? Dan bagaimana kebijakan yang sesuai terhadap transformasi sosial-budaya penduduk di IKN Nusantara?



Gambar 2. Kerangka pemikiran Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN

Transformasi sosial budaya penduduk IKN dapat mengacu pada gambar di atas. Pemindahan Ibu Kota akan berdampak pada penduduk tempatan (penduduk asal) dan penduduk yang berpindah secara sosial dan budaya. Kedua kelompok penduduk tersebut akan akan mengalami transformasi sosial-budaya sesuai tuntutan undang-undang yaitu menjadi penduduk yang merepresentasikan identitas bangsa. Transformasi sosial-budaya penduduk IKN dapat dilalui melalui identifikasi tantangan sosial budaya saat ini dan akan datang, mengidentifikasi kelompok penduduk yang terdampak, dan menyediakan solusi kebijakan yang mengarah pada perubahan perilaku yang kreatif, kolaboratif dan berbudaya.

2. Metode

Kajian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan salah satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan mengandalkan peraturan, buku,

jurnal dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik kajian untuk menghasilkan tulisan yang berkenaan dengan topik atau isu tertentu (Marzali, 2016). Studi literatur dapat memperkaya wawasan terkait topik kajian yang dilakukan, membantu memformulasikan masalah kajian, dan menolong dalam menentukan teori yang tepat untuk membantu analisis dan menemukan jawaban pertanyaan kajian. Studi literatur dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: pengumpulan bahan (peraturan, buku, jurnal/artikel, terbitan lain terkait), melakukan reduksi bahan, display bahan, pengorganisasian dan pembahasan, serta penarikan kesimpulan (Marzali, 2016).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tantangan Sosial Budaya Penduduk IKN

Perubahan sosial budaya penduduk akan terjadi dengan cepat setelah IKN Nusantara resmi berfungsi sebagai sebagai ibu kota baru Indonesia. Tantangan sosial budaya penduduk IKN dapat ditinjau melalui identifikasi terhadap tantangan saat ini dan memprediksi tantangan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

3.1.1. Tantangan Saat Ini

Keberhasilan ibu kota negara baru tergantung dari kesiapan dan dukungan kebijakan pemerintah daerah yang tanggap terhadap perubahan (Park & Choi, 2011). Berkembangnya ibu kota negar dapat menyebabkan hilangnya tempat tinggal masyarakat adat. Seperti yang terjadi pada ibu kota Pakistan (Islamabad), di mana terjadi kesenjangan yang mengakibatkan terpinggirnnya masyarakat asli oleh masyarakat dari pegawai pemerintah dan pebisnis (Bappenas, 2020). Kemudian, masyarakat ibu kota baru harus dididik untuk melek teknologi digital karena pengembangan ibu kota baru akan menggunakan konsep *smart city* (Prihartini, 2020). Dalam konsep *smart city*, literasi digital dan inklusi digital merupakan isu umum yang menjadi bagian penting dari penerapannya.

- **Kesiapan Pemda Tempatan**

Tantangan pemda bukan hanya berlaku pada daerah yang menjadi wilayah IKN. Tantangan juga dihadapi oleh pemda yang berfungsi sebagai penyangga, seperti Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai. Pemda tersebut dihadapi pada penyiapan SDM dan memfasilitasi akses pembangunan infrastruktur IKN. Kemandirian pemda tersebut diuji coba melalui penyediaan program kepada penduduk lokal agar mampu berkontribusi dalam pembangunan IKN. Partisipasi masyarakat merupakan hal utama yang perlu disiapkan oleh pemda karena dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan sosial dan menciptakan keterbukaan aspirasi masyarakat.

- **Hilangnya Tempat Tinggal Penduduk Adat**

Aliansi Penduduk Adat Nusantara memperkirakan 200.000 lebih yang terdiri dari 19 komunitas adat di Penajam paser Utara dan dua kelompok adat di Kutai Kartanegara akan menjadi korban pembangunan IKN (Mantalean, 2022). Kelompok ini akan semakin terpinggirkan dan sulit bertahan hidup karena mata pencahariannya bergantung pada hasil hutan, kebun, sungai dan laut. Ketika ruang untuk hidup beralih fungsi akibat pembangunan IKN, maka penduduk adat juga berpotensi kehilangan tempat tinggal karena persaingan ekonomi. Hal ini dikarenakan selama ini ruang hidupnya bergantung pekerjaan tradisional tersebut.

Menurut (Kodir et al., 2021) pembangunan IKN ditentang oleh komunitas adat dan LSM lingkungan karena masih terdapat beberapa desa dan kecamatan yang kepemilikan lahannya tidak memiliki legalitas namun berdasarkan hukum adat. Penduduk adat yang bertempat tinggal di wilayah IKN khawatir akan terusir karena tidak memiliki legalitas kepemilikan lahan yang diwarisi secara adat. Penolakan

penduduk adat terhadap IKN tidak hanya kekhawatiran rusaknya lingkungan, tetapi karena ketergantungan terhadap lingkungan tempat mereka tinggal sebagai tempat sakral dan warisan yang harus dijaga. Salah satu contoh yang sudah terjadi adalah pembangunan bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku yang menggusur



Gambar 3. Desa di wilayah IKN yang terancam terusir karena tidak memiliki legalitas tanah

Sumber: Pratama, 2022

permukiman penduduk Desa Sepaku dan Semoi karena tidak memiliki legalitas (Pratama, 2022).

• Literasi Digital Penduduk Lokal

Literasi digital merupakan kemampuan pengguna untuk menerima dan menyerap informasi yang diterima melalui media digital seperti alat komunikasi dan jaringan internet. Kecakapan pengguna dalam literasi digital tergantung pada kemampuan untuk melihat, mengevaluasi, dan memanfaatkannya secara cerdas, bijak dan tepat sesuai kemanfaatannya (RTIK Kalbar, 2021). Literasi digital menjadi kunci untuk masyarakat penduduk lokal agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan konsep Ibu Kota Nusantara yang berkonsep *smart city* dan *forest city*.

Hasil dari Indeks Literasi Digital tahun 2021, Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi tempatan IKN berada di peringkat ketiga dengan nilai 3,49 di atas rata-rata nasional yaitu 3,46 (Putri, 2022). Namun demikian, peringkat tersebut masih mengkategorikan Literasi Digital penduduk di Kalimantan Timur dalam level sedang karena skala tertinggi literasi digital adalah lima. Jumlah desa yang mengalami *blankspot* telekomunikasi di Kalimantan Timur masih tinggi yaitu 271 desa atau sebesar 30 persen. Di dua wilayah tempatan IKN juga masih tinggi pada sekitar 30

Tabel 1. Jumlah *blankspot* telekomunikasi berdasarkan desa di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	Jumlah Desa	Persen
1	Balikpapan	0	0	0	0	0%
2	Berau	43	43	42	100	42%
3	Bontang	0	0	2	2	100%
4	Kutai Barat	73	73	86	190	45%
5	Kutai Kartanegara	51	51	56	193	29%
6	Kutai Timur	48	48	34	139	24%
7	Mahakam Ulu	13	3	3	50	6%
8	Paser	61	61	37	130	28%
9	Penajam Paser Utara	15	15	9	30	30%
10	Samarinda	0	0	2	59	3%
Jumlah		304	294	271	893	30%

Sumber: Olah data (Satu Data Kalimantan Timur, 2021)

persen, yaitu 56 desa dari 193 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara dan 9 desa dari 30 desa di wilayah kabupaten Penajam Paser Utara. Begitupun daerah-daerah yang menjadi penyangga IKN yaitu Kabupaten Paser memiliki 37 desa *blankspot* dan Kabupaten Kutai Barat dengan 86 desa *blankspot* telekomunikasi.

Masih tingginya daerah yang mengalami *blankspot* telekomunikasi akan menjadi penghambat penduduk tempatan dan penduduk sekitar IKN untuk meningkatkan literasi digitalnya. Pemahaman literasi digital bagi penduduk tempatan (lokal) sangat penting untuk mengimbangi literasi digital penduduk pendatang yang sudah tinggi. Pemahaman terhadap literasi digital juga akan menjadikan peluang bisnis penduduk tempatan agar tetap menjadi bagian dalam persaingan ekonomi dan pasar kerja di IKN.

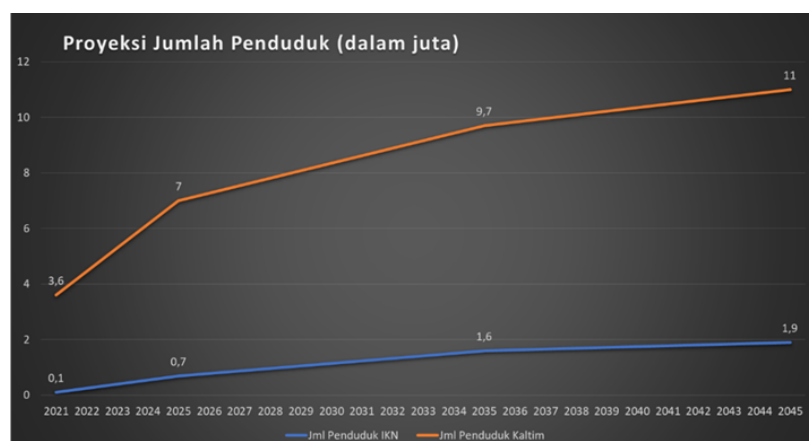
3.1.2. Tantangan Akan Datang

Dalam jangka panjang, Ibu Kota Nusantara akan mengalami tantangan seperti pembangunan kota besar pada umumnya. Beberapa masalah yang melingkupi perkembangan kota besar adalah urbanisasi, konflik karena kesenjangan sosial dan perubahan budaya masyarakat. Urbanisasi yang masif berpotensi terjadi di Ibu Kota Nusantara karena ibu kota identik dengan kota yang multifungsi (diplomasi, pusat pemerintahan, dan ekonomi) yang terus berkembang yang menjadi ciri sebagai kota tujuan urbanisasi (Ecky, 2013). Penetrasi budaya yang dibawa pendatang yang masih bernuansa rural tidak hanya menimbulkan gegar budaya, tetapi dapat mematikan budaya lokal dan berubah menjadi budaya baru (Basundoro, 2022). Sedangkan konflik karena kesenjangan dapat terjadi karena perasaan tersingkir masyarakat tempatan dan tidak diakuinya lagi hak masyarakat adat oleh pendatang dan negara (LIPI, 2019).

- Urbanisasi yang Masif

Salah satu tantangan utama dari pemindahan ibu kota adalah arus urbanisasi yang masif. Urbanisasi tidak hanya terjadi di wilayah Kalimantan Timur saja namun dapat terjadi di wilayah yang lebih luas (Adaba, 2022). Arus urbanisasi setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota akan menjadi daya tarik penduduk dari yang paling dekat yaitu kabupaten penyangga yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Daya tarik ini akan meluas hingga ke wilayah lain di Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia seiring besarnya peluang ekonomi yang bisa didapatkan di IKN.

Di Kabupaten yang menjadi lokasi IKN yaitu Penajam Paser Utara pada tahun 2021 mencapai lebih dari 185.000 jiwa karena terjadi penambahan penduduk lebih dari 9.000 jiwa, yaitu 6.000 lebih jiwa di tahun 2020 dan 3.695 di tahun 2021 (Antara,



Gambar 4. Pola Proyeksi Penduduk Kalimantan Timur dan IKN hingga 2045

2021). Pada tahun 2022 jumlah penduduk Penajam Paser Utara diperkirakan akan mencapai lebih dari 200.000 jiwa karena urbanisasi (CNN Indonesia, 2020). Jumlah penduduk yang diproyeksikan dari 100.000 penduduk di IKN saat ini akan bertambah hingga 700.000 jiwa di tahun 2025, dan terus berkembang hingga mencapai 1.9 juta

jiwa di tahun 2045 (Bappenas & Kominfo, 2020). Kajian beban ekologis IKN juga memperkirakan dalam waktu lima tahun sejak ditetapkannya IKN, jumlah penduduk akan meningkat hingga dua juta jiwa (Susetyo, 2022).

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan juga akan meningkat mengikuti pola proyeksi penduduk IKN dari jumlah penduduk 3,8 juta jiwa di tahun 2021 dapat meningkat hingga 7 juta jiwa di tahun 2025 dan mencapai 11 juta jiwa di tahun 2045 (Bappenas & Kominfo, 2020). Urbanisasi yang terjadi di IKN juga akan berdampak terhadap urbanisasi di provinsi yang berbatasan yaitu Kalimantan Timur, terutama kabupaten dan kota wilayah penyangga, seperti Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai.

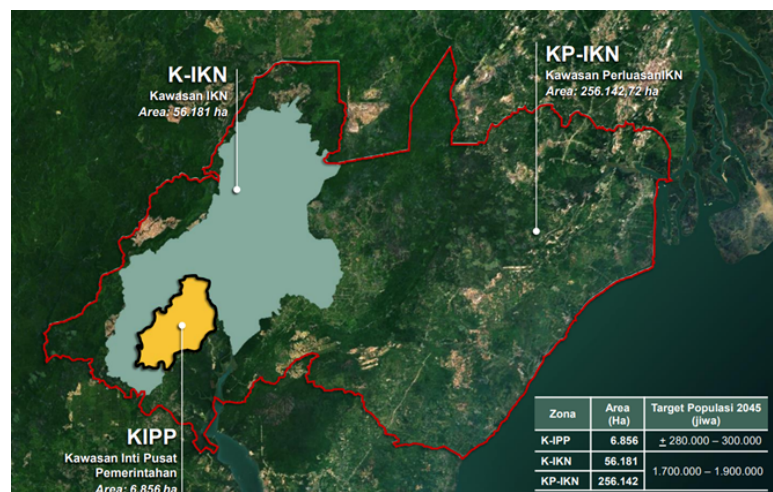
Arus urbanisasi akibat IKN akan mengarah pada terbentuknya kota metropolitan. Pada masa yang akan datang, daya tarik urbanisasi Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota akan berpindah ke IKN dan wilayah kabupaten dan kota sekitarnya (Bappenas, 2019). Tantangan urbanisasi ini dapat mengakibatkan masalah lain yang lebih kompleks, yaitu ketimpangan sosial, konflik antar penduduk lokal dan pendatang, meningkatnya kemiskinan, permukiman kumuh (*slums area*), kejahatan dan kerusakan lingkungan.

- **Munculnya Budaya Baru**

Tantangan lain akibat urbanisasi dari berbagai wilayah yaitu munculnya budaya baru akibat berbaurnya penduduk tempatan dan penduduk pendatang. Munculnya budaya baru ini adalah karena terjadi proses deviasi yang disebut *vicious circle* (Sobirin, 2002). Proses terjadinya *vicious circle* ini dikarenakan gagalnya anggota masyarakat dalam mempertahankan budaya lama (*virtuous circle* yang ada) kemudian membentuk nilai-nilai budaya baru (*virtual circle* baru) yang sesuai dengan kebutuhan (Gagliardi, 1986). Budaya lama memiliki karakteristik meneruskan budaya yang diciptakan oleh orang tua dan pendahulunya, sedangkan budaya baru merupakan hasil interaksi dengan dunia luar yang menyebabkan akulturasi dan enkulturasi (Sobirin, 2002).

Munculnya budaya baru ini memiliki kesamaan dengan terjadinya budaya betawi di Ibu Kota Jakarta, dimana budaya Betawi muncul karena perpaduan budaya penduduk yang dibawa Belanda ke Batavia pada masa penjajahan. Budaya Betawi muncul dari perpaduan etnis yang ada di Indonesia seperti Sunda, Jawa, Bali, Melayu, Bugis, Makassar dan Ambon, serta etnis yang berasal dari luar seperti India, Arab, Tionghoa dan Eropa (Egindo, 2021).

Kemunculan budaya baru Betawi ini terkait dengan strategi Belanda untuk membuat tata letak Batavia terbagi ke dalam tembok kota (dihuni orang eropa) dan wilayah luar tembok yang dihuni etnis Jawa, Sunda, Tionghoa dan lainnya (Swasty, 2022). Hasil kajian yang dilakukan oleh PKM-RSH UGM melihat terdapat kemiripan antara tata ruang Jakarta yang dibangun oleh VOC dengan tata ruang IKN, di mana



Gambar 5. Kawasan inti pemerintahan, kawasan IKN dan kawasan perluasan IKN

Sumber: Kementerian PUPR, 2020

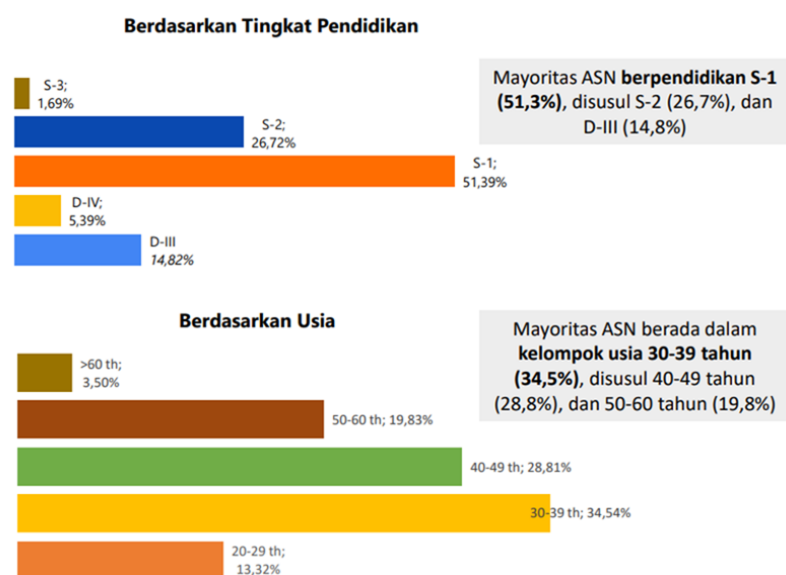
pembangunan IKN dibagi wilayah inti dengan perencanaan ruang dan arsitektur yang lebih rinci serta wilayah pengembangan (periferi) dengan perencanaan yang masih minim (Swasty, 2022).

Menurut secara sosiologis ada tiga kemungkinan yang terjadi terhadap pembentukan budaya baru di IKN, yaitu akulturasi, konservasi dan asimilasi (Wirutomo, 2022). Akulturasi merupakan dominasi budaya pendatang dimana penduduk tempatan hanya bisa mengadopsi budaya pendatang pada level yang rendah. Pada akulturasi, budaya pendatang menjadi dominan dan kuat karena didukung oleh pembangunan yang lebih memihak pada pendatang. Konservasi adalah pengerdilan budaya, dimana pemerintah melindungi budaya asli atau lokal tetapi tidak mengembangkannya dengan budaya modern agar setara. Terakhir, yaitu asimilasi yang merupakan pencampuran budaya yang sifatnya 'win-win' atau tidak ada yang dimenangkan dan dikalahkan antara keduanya. Asimilasi secara alami akan membentuk budaya dengan mengambil nilai-nilai terbaik dan bermanfaat dari budaya asli dan pendatang.

Asimilasi sosial budaya antara penduduk tempatan (lokal) yang berada di IKN maupun perbatasan IKN dengan penduduk pendatang dapat mengarah pada budaya baru yang kuat. Penduduk tempatan di Kalimantan Timur sudah terlebih dahulu mengalami asimilasi budaya sejak lama berdampingan dengan pendatang di masa lalu. Hal ini dikarenakan Kalimantan Timur tumbuh sebagai wilayah yang berkembang karena industri hasil tanaman hutan dan pertambangan. Akibatnya, banyak pendatang dari berbagai etnis tinggal cukup lama dengan penduduk lokal yang memiliki budaya 'menerima' penduduk pendatang. Mayoritas etnis yang sudah ada saat ini di Kalimantan Timur, yaitu Banjar, Bugis Jawa dan Madura sudah dapat hidup berdampingan dengan damai (FISIP UI, 2020). Sehingga, dengan kedatangan pendatang baru karena IKN diharapkan akan terbentuk budaya baru yang merepresentasikan penduduk Indonesia sesungguhnya.

- **Konflik Akibat Kesenjangan Sosial**

Kesenjangan antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang pada skala tertentu akan dapat mengakibatkan konflik. Kesenjangan ini dapat terjadi dalam banyak hal, yaitu akibat perbedaan kualitas SDM yang menyangkut keterampilan (*skill*), pendidikan, kondisi ekonomi, dan keberpihakan pemerintah. Penduduk pendatang dari luar IKN pada umumnya memiliki kualitas yang lebih unggul dalam hal pendidikan, etos kerja, dan keterampilan.



Gambar 6. Exercise statistik ASN yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara

Sumber: KKP IKN, 2021

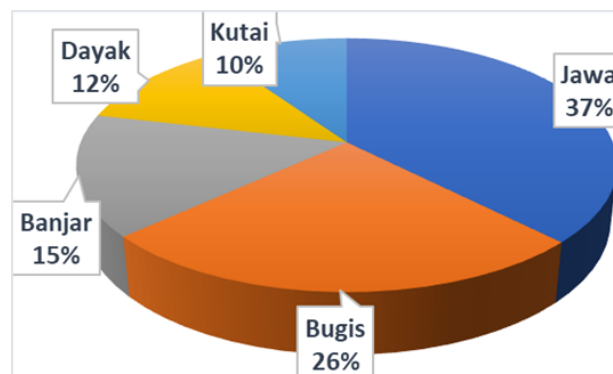
Perpindahan ASN dari kementerian dan lembaga tentunya akan diikuti oleh pekerja swasta di bidang perbankan, kesehatan, pendidikan, wisata, dan termasuk pelaku ekonomi. Infrastruktur pelengkap terbaik juga akan menjadi daya tarik para pekerja berpendidikan dan terampil. Orang-orang yang akan pindah ini merupakan orang pilihan yang memiliki keunggulan sesuai bidang dan keahliannya dari lembaga atau perusahaan yang menempatkan diri di IKN.

Hadirnya penduduk pendatang yang memiliki keunggulan lebih dapat memunculkan isu sosial yang disebut *'culture shock'* bagi penduduk lokal (Kastrat UGM, 2019). Budaya kerja para penduduk pendatang yang terbiasa bekerja di kota besar akan mengakibatkan efek kejut pada penduduk lokal. Efek kejut ini juga dirasakan oleh penduduk lokal yang terbiasa saling mengenal dengan kehadiran orang-orang baru di lingkungan tempat tinggal.

Perbedaan kualitas SDM dapat menjadi pemicu kesenjangan sosial antara penduduk pendatang dan penduduk lokal. Dalam hal peluang usaha dan bekerja, penduduk lokal akan bersaing dengan penduduk pendatang yang umumnya lebih berkompeten. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, sebanyak 47,3 persen responden menyatakan tidak yakin pemindahan IKN akan menjamin perluasan peluang kerja masyarakat lokal (Susilawati, 2022). Hal ini dikarenakan penduduk lokal akan terkalahkan dengan penduduk pendatang yang memang sudah dipersiapkan untuk bekerja di IKN. Akibat persaingan ini, penduduk lokal hanya akan mengisi lapangan pekerjaan yang tersisa karena kesulitan mencari pekerjaan. Apabila terjadi keberpihakan Pemerintah Otorita IKN terhadap ASN kementerian dan lembaga dan kelompok pekerja pendatang, maka juga akan menimbulkan kesan eksklusif yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial.

3.2. Penduduk yang Terdampak

Apabila dilihat dari tingkatannya, penduduk yang terdampak dalam terjadinya transformasi sosial budaya di IKN adalah penduduk lokal. Penduduk lokal yang dimaksud adalah penduduk yang sebelumnya tinggal di wilayah IKN dan penduduk yang tinggal di luar wilayah IKN yang meliputi penduduk pada kabupaten dan kota sekitar, yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai. Dilihat dari etnisnya, penduduk yang mendiami wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur tidak hanya terdiri dari penduduk



Gambar 7. Lima etnis terbesar di Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: FISIP UI, 2020

asli Kalimantan, namun terdiri dari lima etnis besar yaitu Jawa, Bugis, Banjar, Dayak dan Kutai seperti terlihat pada **Gambar 9**.

Wilayah IKN akan menempati dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil Sensus 2020 (BPS Provinsi Kaltim, 2020) jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 729.382 jiwa dan jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 178.681 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk kecamatan yang akan menjadi penduduk lokal di IKN dapat dilihat dalam tabel di

Tabel 2. Jumlah penduduk lokal IKN berdasarkan wilayah kecamatan cakupan IKN

bawah yaitu 349.685 jiwa. Sejumlah penduduk inilah yang menjadi penduduk lokal IKN sebelum didatangi oleh penduduk pendatang. Jumlah penduduk ini yang akan

No	Wilayah	Jumlah Penduduk lokal IKN
Kabupaten Penajam Paser Utara		
1	Kecamatan Penajam	86.040
2	Kecamatan Sepaku	36.357
Kabupaten Kutai Kartanegara		
1	Kecamatan Loa Kulu	51.639
2	Kecamatan Loa Janan	67.471
3	Kecamatan Muara Jawa	41.561
4	Kecamatan Samboja	66.617
Total		349.685

Sumber: Olah data (BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021; BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020)

berkompetisi dengan penduduk pendatang, meningkatkan literasi digital, dan bersiap menghadapi potensi konflik dengan penduduk pendatang.

Penduduk lokal yang tinggal di luar wilayah IKN yaitu sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak menjadi cakupan wilayah IKN. Selain itu, termasuk juga penduduk pada kabupaten dan kota yang dekat dan berbatasan langsung dengan IKN, yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur. Jumlah penduduk yang akan menjadi penduduk lokal penyangga IKN diperkirakan sejumlah 2.956.889 jiwa

Tabel 3. Jumlah penduduk lokal di luar wilayah IKN berdasarkan Kabupaten/Kota

Wilayah	Jumlah Penduduk lokal di luar IKN
Kabupaten Penajam Paser Utara (non-IKN)	56.284*
Kabupaten Kutai Kartanegara (non-IKN)	502.094*
Kabupaten Paser	275452
Kabupaten Kutai Barat	172288
Kabupaten Kutai Timur	434459
Kota Samarinda	827994
Kota Balikpapan	688318
Total	2.956.889

Sumber: Olah data (BPS Provinsi Kaltim, 2020)

yang terinci menurut jumlah penduduk kabupaten/kota seperti dalam tabel di bawah ini.

3.3. Solusi Kebijakan

Solusi kebijakan yang mengarah pada perubahan perilaku masyarakat IKN perlu ditemukan melalui upaya yang kreatif, kolaboratif dan berbudaya. Berdasarkan ulasan sebelumnya, tantangan yang dihadapi masyarakat IKN terbagi menjadi tantangan saat ini dan tantangan akan datang. Tantangan yang dihadapi saat ini pada masyarakat lokal di IKN adalah kesiapan literasi digital masyarakat lokal, kesiapan pemda tempatan dan pemda di luar IKN untuk mengimbangi arus pendatang, dan potensi hilangnya hunian penduduk lokal. Sedangkan tantangan di masa yang akan datang yaitu urbanisasi yang masif, munculnya budaya baru akibat asimilasi berbagai budaya pendatang dan penduduk lokal, serta potensi konflik yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya kesenjangan sosial.

Tantangan dalam waktu dekat di IKN dapat dipecahkan secara kebijakan dengan beberapa cara. Keterbatasan literasi digital masyarakat lokal tempatan IKN dan di luar IKN dapat ditingkatkan dengan program peningkatan literasi digital melalui bantuan pemerintah dan pemda dengan melibatkan LSM lokal. Pemerintah terkait seperti Kemdikbudristek dan Kemkominfo dapat bekerjasama dengan LSM internasional yang

Tabel 4. Tantangan sosial budaya masyarakat IKN dan solusi kebijakannya

Wilayah	Jumlah Penduduk lokal di luar IKN
Tantangan saat ini	
Literasi digital penduduk lokal	Program literasi digital
Kesiapan Pemda	Pembinaan dan Pengawasan Kemendagri
Hilangnya hunian penduduk adat	Peraturan perlindungan hak adat
Tantangan akan datang	
Urbanisasi masif	Urbanisasi terkendali
Munculnya budaya baru	Pemantauan budaya
Konflik akibat kesenjangan sosial	Program Mitigasi konflik

Sumber: Olah data, 2022

memiliki perhatian terhadap peningkatan literasi digital untuk membantu masyarakat lokal IKN.

Kesiapan pemda perlu didorong melalui peran pembinaan dan pengawasan Kemendagri ke pemda tempatan IKN yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemendagri dapat memfasilitasi pelibatan Kementerian/Lembaga lain untuk membantu pemda melakukan beberapa persiapan agar secara fisik dan sosial budaya siap menerima penduduk pendatang. Potensi hilangnya hunian penduduk adat dapat dilakukan dengan mendorong Pemerintah Otorita IKN menerbitkan peraturan yang melindungi hak-hak adat dan budaya di wilayah IKN. Pemerintah perlu menjaga inklusivitas dengan salah satu contohnya yaitu memberikan partisipasi pada penduduk lokal secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan dan perumusan peraturan terkait lingkungan hidup dan pengelolaan taman nasional (Bappenas, 2019). Kemendagri juga turut mendorong Pemprov Kalimantan Timur dan Pemda kabupaten kota di luar IKN turut menerbitkan peraturan yang melindungi hal-hak adat dan budaya untuk masyarakat lokal di luar IKN.

Tantangan jangka panjang yang akan terjadi di IKN maupun sekitarnya dapat dicegah secara kebijakan melalui beberapa upaya yaitu urbanisasi yang terkontrol, pemantauan budaya, dan program mitigasi konflik. Upaya ini memerlukan keseriusan Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait bekerjasama dengan Pemerintah Otorita IKN, Pemprov Kalimantan Timur dan Pemda kabupaten/kota di luar IKN. Peran Kemendagri sebagai kementerian pembina daerah juga penting dalam memfasilitasi kementerian dan lembaga terkait dan pemda (Otorita IKN, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemda di luar IKN) agar terwujud ibu kota negara yang merepresentasikan kemajuan bangsa yang unggul dan contoh kota yang stabil dan inklusif.

Urbanisasi yang terjadi di IKN apabila tidak dikendalikan akan menjadi beban Pemerintah Otorita IKN dan juga pemda di luar IKN. Implikasi dari urbanisasi yang tidak terkendali akan menambah permasalahan IKN di masa depan seperti kurangnya pelayanan dasar, keterbatasan perumahan, kemacetan lalu lintas, munculnya pengangguran dan setengah pengangguran. Apabila urbanisasi berjalan secara alami, maka IKN akan mendapatkan masalah yang sama dengan apa yang dialami oleh Ibu Kota Jakarta saat ini. Kontrol terhadap urbanisasi dapat dilakukan melalui kebijakan pembatasan migrasi penduduk melalui kebijakan yang dapat dibuat bersama-sama oleh BKKBN, Kemendagri (Ditjen Dukcapil), BPS, dan Bappenas untuk mengetahui daya tampung IKN ke depan. Penduduk yang memilih pindah ke IKN adalah penduduk yang parstisipatif, inklusif, mau beradaptasi dengan penduduk pendatang dan melalui beberapa syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Otorita IKN, misalnya adanya jaminan mendapat pekerjaan dan bertempat tinggal di IKN. Dengan demikian urbanisasi menjadi terbatas dan terkendali, dan mau memegang filosofi kehidupan yang selaras dengan nafas Pancasila, yakni, toleransi, kebersamaan, gotong royong, jujur, dan adil.

Potensi hadirnya budaya baru yang terbentuk secara positif akan membentuk masyarakat IKN yang mencirikan jati diri bangsa Indonesia. Namun demikian, apabila munculnya budaya baru ini berjalan tanpa aturan dan tanpa pantauan dari

pemerintah dapat berdampak pada benturan budaya dan berpotensi menjadi konflik antara penduduk pendatang dan penduduk lokal IKN. Terbentuknya budaya baru IKN sebaiknya melalui proses asimilasi budaya yang sifatnya *win-win* dengan mengambil nilai-nilai terbaik dan bermanfaat dari budaya asli dan pendatang. Terbentuknya budaya baru ini juga perlu berbasis pada kearifan lokal agar tidak menimbulkan konflik dan tidak bertentangan pada Pancasila dan UUD 1945 (Hadiningrat, 2021). Pemerintah Otorita IKN juga harus memberikan akses yang sama antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang dalam penggunaan fasilitas publik, hak memiliki perumahan, termasuk menikmati taman dan hutan kota.

Hadirnya budaya baru ini harus difasilitasi dengan konsep tata ruang dan manajemen perkotaan modern yang mampu mengintegrasikan budaya lokal dengan cara tinggal modern (Prasojo, 2020). Aspek sosial budaya sebagai kunci keberhasilan terciptanya penduduk IKN harus turut mempertahankan ciri khas budaya yang ada, khususnya wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dengan memelihara tradisi, adat istiadat, dan kehidupan keberagaman dengan baik (Putri, 2022). Secara sosial budaya pemerintah perlu memperhatikan dalam pembangunan IKN yaitu: mutlaknya representasi budaya setempat dalam pembangunan IKN, pemberian pemahaman keragaman budaya, kebiasaan dan kondisi sosial ekonomi kepada penduduk pendatang, dan perlunya sinergi budaya dan kearifan lokal untuk keberlangsungan penghidupan penduduk setempat (Bappenas, 2019). Pemerintah juga perlu menggalakkan strategi gerakan Literasi Budaya dan Kewargaan di masyarakat agar dapat menerima dan bijak terhadap keberagaman. Literasi Budaya dan Kewargaan adalah kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari budaya dan bangsa (Kemendikbud, 2017).

Diperlukan strategi mitigasi untuk mencegah timbulnya bencana atau konflik horizontal terhadap perkembangan budaya baru di IKN. Penduduk lokal IKN dan di luar IKN harus ikut terlibat, berkontribusi dan mampu bersaing dalam pembangunan IKN agar terhindar dari kesenjangan sosial. Pemerintah Otorita IKN wajib meningkatkan kualitas SDM lokal penduduk setempat dan memberikan akses ke berbagai fasilitas utamanya teknologi agar dapat menjadi bagian dan berkontribusi dalam membangun kota yang pintar, hijau, indah dan berkelanjutan. Masyarakat lokal perlu dibekali program pemberdayaan masyarakat (*community empowerment program*) yang bermanfaat untuk menyediakan pengetahuan, keterampilan dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan menentukan masa depan dan partisipasi dalam komunitas (Susilawati, 2022).

Otorita IKN juga perlu mengajak pemda sekitar yang menjadi wilayah penyangga untuk mengembangkan juga kualitas penduduk lokalnya agar mampu bersaing dengan penduduk pendatang yang di wilayahnya. Akses terhadap teknologi juga perlu ditingkatkan pada penduduk lokal IKN dan di luar IKN. Peningkatan akses pada teknologi akan mendorong literasi digital dan mengarah pada transformasi yang kuat untuk penduduk lokal dan luar IKN. Pelibatan peneliti dan pemerhati sosial dapat berkontribusi dalam perencanaan, penelitian dan program pengembangan masyarakat perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah sosial, ekonomi dan budaya. Kebijakan sosial budaya yang diberikan tidak hanya fokus kepada penduduk lokal yang bertempat tinggal di IKN, tetapi juga diperlukan pada penduduk lokal yang tinggal di daerah penyangga (Prasojo, 2020).

4. Kesimpulan

Proses transformasi sosial budaya penduduk IKN mengalami beberapa tantangan, antara lain: belum tingginya literasi digital penduduk lokal di dalam dan di luar IKN, belum maksimalnya pemda dalam menyiapkan kualitas sdm penduduknya dan potensi hilangnya hunian penduduk adat di IKN. Tantangan transformasi sosial budaya yang akan datang di IKN yaitu urbanisasi yang masif, munculnya budaya baru dan konflik akibat kesenjangan sosial. Kebijakan dalam jangka pendek adalah program literasi digital untuk penduduk lokal, perlunya pembinaan dan pengawasan

dari Kemendagri, dan penyusunan peraturan perlindungan hak adat. Sedangkan kebijakan jangka panjang yang dapat diambil adalah membatasi pendatang ke IKN melalui seleksi (pengendalian urbanisasi), pemantauan asimilasi budaya ke arah positif, dan perlunya program mitigasi konflik. Untuk mewujudkan kebijakan terhadap tantangan transformasi sosial budaya ini diperlukan koordinasi yang kuat antara Pemerintah, Pemda, LSM dan masyarakat. Kemendagri sebagai kementerian pembina dan pengawas pemda wajib untuk memberikan fasilitasi demi terwujudnya budaya baru di IKN yang merepresentasikan masyarakat Indonesia di mata dunia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri yang telah memberikan dukungan dalam kajian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Muhammad Noval selaku Kepala Pusat Litbang Adwil, Pemdes dan Kependudukan yang telah memberikan banyak masukan dalam penyusunan kajian ini.

REFERENSI

- Adaba, P. Y. (2022). Pemindahan Ibukota dan Strategi Kependudukan. <https://Politik.Brin.Go.Id/Kolom/Pemilu-Partai-Politik-Otonomi-Daerah/Pemindahan-Ibukota-Dan-Strategi-Kependudukan/>.
- Antara. (2021, August 12). Urbanisasi di Ibukota Baru Tak Terkendali, bertambah 9.000 Warga Baru. <https://Tirto.Id/Urbanisasi-Ibu-Kota-Baru-Tak-Terbendung-Bertambah-9000-Warga-Baru-GiyZ>.
- Bappenas. (2019). Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara.
- Bappenas. (2020). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.
- Bappenas, & Kominfo. (2020, February 26). Pembangunan Ibu Kota Negara Libatkan Masyarakat Lokal hingga Kembangkan Sektor Industri Digital dan Inovasi. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/24653/pembangunan-ibu-kota-negara-libatkan-masyarakat-lokal-hingga-kembangkan-sektor-industri-digital-dan-inovasi/0/artikel_gpr.
- Basundoro, P. (2022, January 24). Nasib Budaya Lokal di IKN Baru. Jawa Pos. <https://www.jawapos.com/opini/24/01/2022/nasib-budaya-lokal-di-ikn-baru/>.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2021). Umlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan, Hasil SP 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara. In <https://kukarkab.bps.go.id/statistictable/2021/11/08/21/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-hasil-sp-2020-kabupaten-kutai-kartanegara-.html>.
- BPS Kabupaten Penajam Paser Utara. (2020). Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa) 2020. In <https://ppukab.bps.go.id/indicator/12/332/1/-sp2020-jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>.
- BPS Provinsi Kaltim. (2020). Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur 2020. In Sensus Penduduk 2020. BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Charles, G. (2014, November 7). Marketing 3.0. <https://www.slideserve.com/charles-good/marketing-3-0>.
- CNN Indonesia. (2020). Banyak warga urus surat pindah ke penajam ibu kota baru.
- Ecky, A. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemindahan Ibu Kota Negara [Skripsi S-1]. Institut Pertanian Bogor.
- Egindo. (2021, March 19). Sejarah Asal Usul Suku Betawi Dan Kebudayaannya. <https://egindo.com/sejarah-asal-usul-suku-betawi-dan-kebudayaannya/>.
- FISIP UI. (2020, February 27). Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara. <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/>.
- Gagliardi, P. (1986). The Creation and Change of Organizational Cultures: A Conceptual Framework. *Organization Studies*, 7(2), 117–134. <https://doi.org/10.1177/017084068600700203>
- Hadiningrat, S. (2021). ASPIRASI RAKYAT DALAM PEMINDAHAN IKN DARI JAKARTA KE KALIMANTAN TIMUR.
- Kastrat UGM. (2019, June 10). Paradigma Pemindahan Ibu Kota Negara. https://www.kompasiana.com/kastratfebugm/5cfe275e0d82300f003f95c5/Paradigma-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara?Page=6&page_images=4.
- Kemendikbud. (2017). Materi Pendukung: Literasi Budaya dan Kewargaan (L. A. Mayani, Ed.). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian PUPR. (2020). Urban Design Development Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN.
- Kistanto, N. H. (2018). *TRANSFORMASI SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA*. 13(2).
- KKP IKN. (2021). Rencana Pemindahan ASN ke IKN Baru.
- Kodir, A., Hadi, N., Astina, I. K., Taryana, D., Ratnawati, N., & Idris. (2021). The dynamics of community response to the development of the New Capital (IKN) of Indonesia. In *Development, Social Change and Environmental Sustainability* (pp. 57–61). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003178163-13>
- Kominfo. (2020). Wujudkan Transformasi Digital, Kominfo Gencar Kembangkan Infrastruktur. Kominfo. Go.Id, 2–3.
- LIPI. (2019, May 28). Mengurangi Risiko Sosial dalam Pemindahan Ibu Kota. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Mantalean, V. (2022, January 21). Megaprojek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan “hapus dosa” Korporasi. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/08204891/Megaprojek-Ikn-20000-Masyarakat-Adat-Tersingkir-Dan-Dugaan-Hapus-Dosa>.

- Marzali, A. (2016). *Menulis Kajian Literatur*. *Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 27–36.
- Park, & Choi. (2011). Study on the Typology and Functions of Policy Brokers in the Advocacy Coalition Framework: The Case of Sejong City). *Korean Journal of Public Administration*, 49(2), 103–125.
- Prasojo, E. (2020). Satu Dua Pemikiran Mengenai Rencana Perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia.
- Pratama, S. I. (2022, August 1). Masyarakat Adat di IKN Masih Was-was Dengan Status Tanah Mereka. <https://Betahita.Id/News/Lipsus/7826/Masyarakat-Adat-Di-Ikn-Masih-Was-Was-Dengan-Status-Tanah-Mereka.Html?V=1659356066>.
- Prihartini, A. (2020, February 12). Berkonsep Smart City, Warga Ibu Kota Baru di Kaltim diharapkan Melek Teknologi. Ibukotakita.
- Putri, N. H. (2022, February 23). Kaltim Peringkat Ketiga Indeks Literasi Digital Tahun 2021. <https://Diskominfo.Kaltimprov.Go.Id/Index.Php/Pemerintahan/Kaltim-Peringkat-Ketiga-Indeks-Literasi-Digital-Tahun-2021>.
- RTIK Kalbar. (2021, February 16). Ferianto Narasumber Kegiatan Literasi Digital Bertema Bangkit Dari Pandemi Bersama Literasi Digital di Kalimantan Timur Tahun 2021. <https://Rtikkalbar.My.Id/Ferianto-Narasumber-Kegiatan-Literasi-Digital-Bertema-Bangkit-Dari-Pandemi-Bersama-Literasi-Digital-Di-Kalimantan-Timur-Tahun-2021/>.
- Satu Data Kalimantan Timur. (2021). Data Persentase Blankspot Telekomunikasi Berdasarkan Desa Tingkat Kabupaten Kota Provinsi Kaltim Tahun 2015-2019. In <https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-persentase-blankspot-telekomunikasi-berdasarkan-desakabkota-provinsi-kaltim-tahun-2015-2019/resource/61d9c612-d8e9-4ab2-afef-39b34d82918d>.
- Sobirin, A., & Ekonomi, F. (2002). BUDAYA: SUMBER KEKUATAN SEKALIGUS KELEMAHAN ORGANISASI (Vol. 1, Issue 7).
- Susetyo, P. D. (2022, March 15). Beban Ekologis IKN. <https://Www.Kompas.Id/Baca/Artikel-Opini/2022/03/13/Beban-Ekologis-Ikn>.
- Susilawati, E. (2022, July 2). Urgensi Pemindahan IKN dalam Aspek Sosial Budaya Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Urgensi Pemindahan IKN dalam Aspek Sosial Budaya”, Klik untuk baca: https://www.kompasiana.com/efisusilawati/62c05f91bd09467b05279a22/urgensi-pemindahan-ikn-dalam-aspek-sosial-budaya?page=3&page_images= Kreator: Efi Susilawati Kompasiana adalah platform blog, setiap konten menjadi tanggungjawab kreator. Tulis opini Anda seputar isu terkini di Kompasiana.com.
- Swasty, R. (2022, September 30). Penelitian UGM: Ada Kemiripan Tata Ruang Batavia di IKN yang Bisa Munculkan Budaya Baru. <https://Www.Medcom.Id/Pendidikan/Riset-Penelitian/0KvL0grb-Penelitian-Ugm-Ada-Kemiripan-Tata-Ruang-Batavia-Di-Ikn-Yang-Bisa-Munculkan-Budaya-Baru>.
- Wirutomo, P. (2022). Masukan sosiologis untuk RUU IKN. <https://Www.Dpr.Go.Id/Dokakd/Dokumen/PANSUS-RJ-20211215-032649-2674.Pdf>.